

Strategi Exit dan Keberlanjutan Finansial : Evaluasi Kemandirian UMKM Alumni Jakpreneur Pasca-Intervensi Pemerintah

Junaidi Hendro¹ Sri Handoko Sakti² Muhammad Natser³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

e-mail: 1junaidi.hendro2571@gmail.com, 2handokovea@gmail.com, 3mnatsera@gmail.com

* Junaidi Hendro

ABSTRACT

The Jakarta Entrepreneur Program (Jakpreneur) was designed as an integrated entrepreneurial ecosystem through Gubernatorial Regulation No. 2 of 2020. The program's primary focus is to transform Jakarta's MSMEs into innovative and independent business units. However, post-mentoring sustainability is crucial. This study evaluates the level of financial independence of MSMEs assisted by Jakpreneur by analyzing the implementation of the 7P framework in various regions. Through a qualitative literature review, it was found that the program's effectiveness is often hampered by "equal distribution of facilities" at the expense of "depth of intervention." The results indicate a decline in tiered participation (from registration to capital) and low levels of independent digital literacy (only 8.40% in the marketplace). Key recommendations include redesigning exit strategies based on Artificial Intelligence (AI) technology to ensure alumni remain competitive without relying entirely on government subsidies.

Keywords: *Jakpreneur, Financial Independence, Exit Strategy, MSME Resilience, Digital Transformation.*

Article submission: 18 June 2026

Article revision: 20 June 2026

Article acceptance: 20 July 2026

I. INTRODUCTION

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar strategis bagi stabilitas ekonomi nasional dan daerah. Di Indonesia, sektor ini memberikan kontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 117 juta tenaga kerja. Khusus di Provinsi DKI Jakarta, UMKM menjadi fokus utama kebijakan pembangunan ekonomi lokal melalui Program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur). Program yang diatur dalam Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2020 ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan sebuah strategi Pengembangan



Kewirausahaan Terpadu (PKT) yang dirancang untuk menciptakan ekosistem wirausaha yang inovatif, kreatif, dan mandiri melalui kolaborasi lintas sektor.

Inti dari intervensi Jakpreneur terletak pada kerangka kerja 7P (7 Langkah PAS – Pasti Akan Sukses), yang mencakup tahapan Pendaftaran (P1), Pelatihan (P2), Pendampingan (P3), Perizinan (P4), Pemasaran (P5), Pelaporan Keuangan (P6), hingga Permodalan (P7). Secara teoretis, intervensi sistematis ini bertujuan untuk menggeser pola pikir pelaku usaha dari model konvensional menuju wirausaha adaptif yang mampu melakukan "kombinasi baru" sebagaimana dijelaskan dalam teori kewirausahaan Schumpeter. Namun, efektivitas program ini menghadapi tantangan besar terkait resiliensi dan keberlanjutan usaha pasca-intervensi.

Analisis terhadap berbagai studi evaluasi regional menunjukkan adanya paradoks performa. Di satu sisi, studi kualitatif di wilayah seperti Pesanggrahan dan Tamansari melaporkan keberhasilan signifikan dalam peningkatan omzet, perluasan jaringan, dan inovasi produk hingga 300%. Di sisi lain, penelitian kuantitatif dengan kelompok kontrol (data SAKERNAS) justru menemukan bahwa pendapatan pelaku UMKM binaan seringkali lebih rendah dibandingkan kelompok non-binaan. Hal ini mengindikasikan adanya celah besar dalam penguasaan faktor produksi efisiensi (teknologi dan manajemen) yang menyebabkan UMKM binaan gagal mengonversi pelatihan menjadi profitabilitas mandiri yang kompetitif.

Masalah krusial lainnya adalah "The Funneling Problem" (Penurunan Partisipasi Berjenjang). Data partisipan menunjukkan tren penurunan drastis di mana jumlah UMKM yang mencapai tahap akhir (P6-P7) sangat kecil dibandingkan pendaftar awal (P1). Penurunan ini diperparah oleh kebijakan pemerataan fasilitas yang membatasi kedalaman intervensi; banyak peserta hanya bisa mengakses satu fasilitas per tahun, sehingga proses pendampingan menjadi terfragmentasi dan tidak tuntas. Akibatnya, ketergantungan terhadap stimulus pemerintah – seperti bazar gratis tetap tinggi, sementara kemandirian dalam mencari pasar mandiri tetap rendah.

Dalam konteks digitalisasi, kesenjangan antara potensi dan realitas tampak sangat lebar. Meskipun digitalisasi dipandang sebagai kunci resiliensi pasca-pandemi, adopsi teknologi oleh Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Jakarta masih



sangat rendah: hanya 22,89% yang menggunakan media sosial dan 8,40% yang memanfaatkan marketplace. Tingkat penggunaan QRIS sebagai fondasi transparansi keuangan digital pun baru mencapai 11,29%. Tanpa penguasaan platform digital secara mandiri, UMKM alumni Jakpreneur akan sulit bertahan ketika dukungan langsung pemerintah dikurangi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi intervensi Jakpreneur dengan fokus pada formulasi strategi exit dan keberlanjutan finansial. Kehadiran teknologi masa depan seperti Kecerdasan Buatan (AI) memang dipandang mampu menjembatani hambatan literasi digital. Namun, tanpa re-desain program yang mendorong otonomi operasional dan keuangan sejak dini, program pemberdayaan berisiko terjebak dalam siklus bantuan yang tidak menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Analisis dalam jurnal ini akan memberikan perspektif kritis mengenai transisi UMKM dari binaan menjadi alumni mandiri yang otonom dan kompetitif di pasar global.

II. LITERATURE REVIEW

2.1 Teori Kewirausahaan Joseph Schumpeter : Inovasi sebagai Penggerak Resiliensi

Dalam diskursus ekonomi pembangunan, Joseph Schumpeter memandang wirausahawan bukan sekadar pedagang, melainkan agen perubahan (*agent of change*) yang mendorong pertumbuhan melalui proses "Creative Destruction" (Penghancuran Kreatif). Teori ini menyatakan bahwa kemandirian ekonomi tercapai ketika pelaku usaha mampu menggantikan sistem lama yang stagnan dengan model baru yang lebih produktif melalui "Kombinasi Baru".

Analisis mendalam terhadap program Jakpreneur menunjukkan bahwa transformasi ini terjadi melalui inovasi mikro:

- a. Inovasi Produk: Mengubah persepsi jamu tradisional yang dianggap kuno menjadi minuman herbal botol modern yang siap minum dan higienis.
- b. Inovasi Metode: Peralihan dari produksi rutin tanpa perencanaan ke sistem *pre-order* yang memanfaatkan platform digital untuk manajemen produksi yang lebih



terencana. Dalam konteks strategi *exit*, kemandirian finansial alumni sangat bergantung pada sejauh mana mereka tetap mempertahankan semangat inovasi Schumpeterian ini tanpa stimulan terus-menerus dari pemerintah.

- c. Inovasi Pemasaran: Meninggalkan metode mulut-ke-mulut dan mulai menguasai ekosistem e-commerce.

2.2 Evaluasi Kebijakan Publik William N. Dunn

Evaluasi efektivitas program Jakpreneur dalam skala regional memerlukan instrumen penilaian yang holistik. Teori evaluasi William N. Dunn menyediakan enam kriteria utama: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

- a. Efektivitas mengukur sejauh mana hasil yang diinginkan (kemandirian UMKM) tercapai.
- b. Kecukupan menilai apakah sumber daya pendamping (rasio pendamping terhadap ribuan peserta) memadai untuk menyelesaikan masalah UMKM secara tuntas. Analisis menunjukkan bahwa meskipun realisasi anggaran mencapai 92,53% (Efisien), kriteria Kecukupan belum optimal karena kebijakan pemerataan fasilitas seringkali mengorbankan kedalaman intervensi yang dibutuhkan satu unit usaha untuk benar-benar "naik kelas".

2.3 Teori Fungsi Produksi Cobb-Douglas dan Variabel Efisiensi

Ketahanan pendapatan UMKM dapat dijelaskan melalui Fungsi Produksi Cobb-Douglas, di mana output produksi (Q) dipengaruhi oleh modal (K), tenaga kerja (L), dan faktor efisiensi (A). $Q = A \cdot K^\alpha \cdot L^\beta$ Variabel A (Total Factor Productivity) dalam konteks UMKM mencerminkan penguasaan teknologi manajemen dan keterampilan SDM. Temuan empiris pada Jakpreneur menunjukkan sebuah anomali: UMKM binaan memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja (L) yang lebih tinggi (resilien secara sosial), namun pendapatan (Q) mereka cenderung lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi Jakpreneur baru



menyentuh aspek kuantitas faktor produksi, namun belum secara mendalam meningkatkan variabel efisiensi (A) melalui digitalisasi dan akuntansi mandiri yang krusial untuk keberlanjutan finansial pasca-program.

2.4 Metodologi Balanced Scorecard (BSC) dalam Pengembangan UMKM

Evaluasi kinerja UMKM tidak dapat hanya bersandar pada perspektif keuangan jangka pendek. Framework Balanced Scorecard mengintegrasikan empat perspektif: Keuangan, Pelanggan, Bisnis Internal, serta Pembelajaran dan Pertumbuhan.

- a. Pembelajaran & Pertumbuhan: Fokus pada peningkatan produktivitas karyawan (naik 43%) melalui pelatihan Jakpreneur.
- b. Bisnis Internal: Mencakup inovasi produk (naik 300%) dan efisiensi operasional. Analisis BSC menegaskan bahwa kemandirian finansial (Perspektif Keuangan) adalah hasil akhir dari rantai nilai yang dimulai dari kualitas pembelajaran. Jika UMKM alumni tidak mampu menjaga konsistensi pada perspektif pembelajaran pasca-pendampingan, maka kinerja keuangan mereka akan kembali mengalami penurunan (stagnasi ROI).

2.5 Technology Acceptance Model (TAM) dan Digitalisasi AI

Kesiapan UMKM untuk beroperasi secara otonom pasca-intervensi sangat ditentukan oleh adopsi teknologi. Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan bahwa penggunaan teknologi ditentukan oleh *perceived usefulness* (persepsi kegunaan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan). Kesenjangan digital yang lebar di Jakarta di mana hanya 8,40% UMKM yang menggunakan marketplace dan 11,29% yang aktif menggunakan QRIS menunjukkan adanya hambatan pada kemudahan penggunaan, terutama bagi pelaku usaha lansia. Integrasi Kecerdasan Buatan (AI) diusulkan sebagai solusi untuk menjembatani hambatan ini, di mana AI dapat melakukan analisis pasar, desain produk, dan segmentasi konsumen secara mandiri, sehingga mengurangi ketergantungan alumni pada arahan manual dari pendamping pemerintah.



2.6 Konsep Pemberdayaan dan Pembangunan Sosial Transformatif

Pemberdayaan pada intinya adalah memampukan masyarakat untuk menjadi subjek perubahan, bukan sekadar objek bantuan. Dalam kerangka pembangunan sosial, Jakpreneur berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial transformatif yang memberikan pengakuan formal melalui legalitas (NIB) dan sertifikasi. Analisis mengenai Strategi Exit harus menekankan pada transisi psikologis dan operasional: Peningkatan rasa percaya diri melalui kepemilikan izin usaha resmi. Pembentukan modal sosial melalui jaringan kolaboratif antar binaan yang tetap aktif meskipun periode pelatihan formal telah berakhir. Kemandirian finansial alumni tercapai apabila ekosistem sosial yang terbentuk mampu mensubstitusi peran pendamping pemerintah dalam memberikan informasi dan akses pasar.

III. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tipe penelitian eksplanatif untuk menggali fenomena kemandirian finansial pelaku UMKM binaan Jakpreneur. Pendekatan ini dipilih karena peneliti tidak hanya bermaksud mendeskripsikan program 7P, tetapi juga menganalisis hubungan sebab-akibat antara intensitas intervensi pemerintah dengan tingkat resiliensi alumni usaha di lapangan.

3.1 Desain Penelitian dan Lokasi

Desain penelitian ini menggunakan Studi Kasus Multi-Situs untuk membandingkan implementasi regional di berbagai wilayah DKI Jakarta, mencakup Jakarta Selatan (Kebayoran Lama, Pancoran, Tebet), Jakarta Barat (Tamansari), Jakarta Utara (Penjaringan), dan Jakarta Timur (Cipayung). Penggunaan multi-situs memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola umum dan anomali dalam efektivitas strategi *exit* di lingkungan administratif yang berbeda.

3.2 Teknik Penarikan Sampel (Purposive Sampling)

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu memilih subjek berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan evaluasi keberlanjutan. Kriteria informan meliputi:



1. Alumni Binaan: Pelaku UMKM yang telah bergabung sejak tahun 2017-2018 (kelompok *treatment* jangka panjang) untuk melihat resiliensi pasca-pelatihan intensif.
2. Penyelenggara Program: Pejabat Suku Dinas PPKUKM dan Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) di tingkat kecamatan untuk memahami kendala birokrasi dan anggaran.
3. Pendamping Kewirausahaan: Fasilitator lapangan yang memiliki sertifikasi BNSP untuk mengevaluasi dinamika pendampingan harian.
4. Ekosistem Pendukung: Konsumen dan keluarga pelaku UMKM untuk memvalidasi dampak program terhadap kualitas hidup dan stabilitas sosial.

3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Triangulasi

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan Triangulasi Sumber, Teknik, dan Waktu. Data dikumpulkan melalui:

- a. Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Dilakukan secara fleksibel untuk menggali persepsi pelaku usaha mengenai kemandirian finansial dan efektivitas bazar.
- b. Observasi Lapangan: Pengamatan langsung terhadap aktivitas produksi, penggunaan alat bantu produksi hasil bantuan pemerintah, serta partisipasi dalam bazar daring maupun luring.

Dokumentasi dan Data Sekunder: Analisis terhadap Laporan Mingguan Dinas PPKUKM, Profil Industri Mikro dan Kecil (IMK) dari BPS, serta data realisasi anggaran APBD.

IV. RESULTS

4.1 Efektivitas Intervensi Framework 7P dan Paradoks Kinerja UMKM

Implementasi kerangka kerja 7P (7 Langkah PAS) di berbagai wilayah DKI Jakarta menunjukkan keberhasilan pada level *output* administratif, namun menciptakan anomali pada level *outcome* kesejahteraan. Di Kecamatan Tamansari, penggunaan metode *Balanced Scorecard* mencatat peningkatan produktivitas karyawan sebesar 43% dan lonjakan inovasi produk hingga 300%. Namun, temuan ini kontradiktif dengan studi kuantitatif berskala lebih luas yang menggunakan metode *matching* terhadap



data SAKERNAS. Kelompok UMKM binaan Jakpreneur justru ditemukan memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol non-binaan.

Paradoks ini dijelaskan oleh fakta bahwa UMKM binaan Jakpreneur cenderung lebih resilien dalam penyerapan tenaga kerja di masa krisis dibandingkan kemampuan menghasilkan profit. Pelaku UMKM binaan memilih mengorbankan aset pribadi demi mempertahankan karyawan, sebuah bentuk tanggung jawab sosial yang tinggi namun berisiko bagi keberlanjutan finansial jangka panjang usaha itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi 7P baru berhasil pada penguatan modal sosial dan operasional dasar, namun belum menyentuh aspek efisiensi faktor produksi yang mampu mengonversi pelatihan menjadi daya saing pendapatan yang unggul.

4.2 Analisis "The Funneling Problem": Penurunan Partisipasi Berjenjang

Salah satu temuan paling krusial dalam evaluasi ini adalah adanya fenomena penurunan partisipasi yang drastis di setiap tahapan program, atau yang diidentifikasi sebagai "The Funneling Problem". Berdasarkan data partisipan tahun 2023-2024, terjadi penyusutan jumlah peserta yang sangat signifikan dari tahap awal hingga akhir:

- a. Pendaftaran (P1) : Mencatat puluhan ribu peminat (misal: 29.707 pada 2023).
- b. Permodalan (P7) : Hanya diikuti oleh segelintir peserta (1.514 pada 2023, menurun drastis menjadi 126 pada 2024).

Penurunan ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, faktor internal peserta, di mana banyak pelaku usaha hanya tertarik pada fasilitas tertentu seperti perizinan gratis (P4) atau akses bazar (P5) tanpa bermaksud menuntaskan rangkaian pengembangan kemandirian keuangan (P6). Kedua, kebijakan pemerataan fasilitas, di mana satu UMKM dibatasi hanya boleh mengikuti satu fasilitas utama dalam satu tahun anggaran demi azas keadilan. Strategi "pemerataan" ini justru menghambat "kedalaman intervensi" yang dibutuhkan untuk membawa UMKM benar-benar naik kelas secara tuntas, sehingga menciptakan alumni yang setengah matang secara kompetensi.

4.3 Kesenjangan Digital dan Hambatan Otonomi Keuangan (P6)

Kemandirian finansial pasca-pendampingan mustahil tercapai tanpa transparansi dan efisiensi laporan keuangan digital. Namun, realita di lapangan menunjukkan



literasi digital mandiri masih menjadi hambatan terbesar. Data tahun 2023 mencatat adopsi teknologi oleh Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Jakarta masih sangat rendah: hanya 22,89% yang menggunakan media sosial dan hanya 8,40% yang memanfaatkan marketplace.

Lebih jauh, pada tahap Pelaporan Keuangan (P6), ditemukan bahwa:

- a. Tingkat penggunaan QRIS di kalangan binaan hanya mencapai 11,29%.
- b. Pelaku UMKM, terutama kalangan ibu rumah tangga dan lansia, merasa tampilan situs web Jakpreneur sulit dimengerti, sehingga proses input laporan keuangan seringkali tetap bergantung pada pendamping.

Tanpa kemampuan mengelola data keuangan secara mandiri lewat sistem digital, UMKM alumni akan terus mengalami penolakan dari lembaga perbankan saat mencoba mengakses permodalan mandiri (tahap P7) karena dinilai tidak memiliki catatan keuangan yang kredibel (*unbankable*).

4.4 Transformasi Mindset Schumpeterian dan Modal Sosial

Meskipun menghadapi kendala teknis, Jakpreneur berhasil melakukan transformasi psikologis yang mendalam bagi binaannya. Sesuai perspektif Schumpeter mengenai *creative destruction*, program ini memicu lahirnya inovator mikro yang berani menggantikan pola lama. Contoh nyata ditemukan pada binaan yang mengubah persepsi jamu tradisional yang kuno menjadi produk minuman botol herbal modern dengan sistem *pre-order* berbasis digital.

Modal sosial juga terbentuk melalui jaringan kolaboratif antar pelaku usaha. Di wilayah seperti Cipayung, binaan secara inisiatif membentuk grup mandiri untuk promosi bersama dan pertukaran informasi pasar saat pendampingan formal berakhir. Kekuatan relasional inilah yang menjadi fondasi resiliensi alumni pasca-intervensi pemerintah, di mana ekosistem sesama pelaku usaha berperan menggantikan fungsi pembinaan birokratis.

4.5 Potensi Kecerdasan Buatan (AI) sebagai Katalisator Strategi Exit

Untuk menjembatani celah literasi digital dan keterbatasan jumlah pendamping (rasio 5 pendamping untuk ribuan peserta), integrasi AI menjadi solusi strategis dalam strategi *exit*. AI memiliki potensi besar untuk:



- a. Otomasi Analisis Pasar: Membantu UMKM alumni melakukan segmentasi konsumen secara mandiri tanpa perlu mentor ahli.
- b. Desain Produk: Mempercepat inovasi desain kemasan melalui alat berbasis AI untuk meningkatkan daya saing global.
- c. Monitoring Jarak Jauh: Pemerintah dapat beralih dari pendampingan fisik ke sistem monitoring performa alumni berbasis data AI untuk memastikan mereka tidak berhenti beroperasi setelah dukungan subsidi bazar dikurangi.

4.6 Evaluasi Berdasarkan Kriteria William N. Dunn

Secara holistik, evaluasi Jakpreneur di wilayah Jakarta Selatan menunjukkan bahwa meskipun realisasi anggaran sangat efisien (92,53%), kriteria Kecukupan belum sepenuhnya optimal. Masalah utamanya bukan pada kualitas pelatihan, melainkan pada keberlanjutan partisipasi (Pancoran) dan koordinasi antar perangkat daerah (Tebet). Selain itu, terdapat masalah Perataan Demografis, di mana program masih sangat didominasi oleh ibu rumah tangga (usia 35-55 tahun), sementara partisipasi generasi muda (Gen Z) sangat rendah karena persepsi program yang kurang modern. Hal ini menunjukkan perlunya *re-branding* strategis agar alumni Jakpreneur masa depan lebih inklusif dan progresif secara teknologi.

Tabel 1 : Tren Penurunan Partisipasi Peserta Berjenjang (The Funneling Problem) 2023-2024

Tabel ini menunjukkan adanya hambatan serius dalam keberlanjutan program, di mana jumlah peserta menurun drastis saat memasuki tahapan kemandirian finansial (P6-P7).

No	Tahapan Program (7 PAS)	Jumlah Partisipan (2023)	Jumlah Partisipan (2024)	Penurunan (%)
1	P1 - Pendaftaran	29.707	19.338	-34,9%
2	P2 - Pelatihan	48.515	41.617	-14,2%
3	P3 - Pendampingan	20.585	7.062	-65,7%
4	P4 - Perizinan	247.702	11.616	-95,3%
5	P5 - Pemasaran	20.911	13.593	-35,0%
6	P6 - Pelaporan Keuangan	3.351	1.032	-69,2%
7	P7 - Permodalan	1.514	126	-91,7%

Sumber: Data Mingguan Dinas PPKUKM DKI Jakarta (diolah dari sumber)



Tabel 2 : Perbandingan Performa UMKM Binaan (Treatment) vs Non-Binaan (Control)

Tabel ini mendasari argumen mengenai "Paradoks Performa" di mana binaan lebih resilien secara sosial (tenaga kerja) namun lebih lemah secara pendapatan.

Indikator Performa	Kelompok Binaan (Jakpreneur)	Kelompok Kontrol (SAKERNAS)	Selisih / Efek
Rerata Pendapatan (2019)	Lebih Rendah	Lebih Tinggi	-Rp 1.308.317 (ATT)
Rerata Pendapatan (2020)	Menurun Ekstrim	Menurun	-Rp 1.399.626 (ATT)
Ketahanan Tenaga Kerja	Sangat Tinggi	Rendah	Koefisien Positif (3.1 - 3.7)
Alasan Tutup Usaha Utama	Tidak Laku / Promosi Sulit	Faktor Ekonomi Umum	Keterbatasan Digitalisasi

Sumber: Hasil Matching dan Regresi (diolah dari sumber,,)

Tabel 3: Evaluasi Kinerja Internal UMKM (Metode Balanced Scorecard)

Tabel ini memberikan bukti bahwa intervensi Jakpreneur sangat kuat pada level inovasi dan kapasitas SDM.

Perspektif BSC	Indikator Kinerja	Hasil Capaian	Status
Bisnis Internal	Pengembangan Inovasi Produk	300%	Sangat Berhasil
Pertumbuhan & Pembelajaran	Peningkatan Produktivitas Karyawan	43%	Berhasil
Pelanggan	Tingkat Kepuasan Layanan	86%	Sangat Puas
Keuangan	Pertumbuhan Laba Bersih	24%	Berhasil
Keuangan	Rasio Cepat (<i>Fast Ratio</i>)	-29%	Penurunan

Sumber: Studi Kasus Kecamatan Tamansari (diolah dari sumber,,)

Tabel 4: Profil Adopsi Digital dan Transaksi Mandiri UMKM DKI Jakarta (2023)

Tabel ini menunjukkan celah digitalisasi yang menghambat alumni untuk melakukan *exit strategy* secara mandiri.

No	Instrumen Digitalisasi	Tingkat Adopsi (%)	Target Ideal	Gap
1	Penggunaan Media Sosial untuk Bisnis	22,89%	> 50%	27,11%



2	Pemanfaatan <i>Marketplace</i>	8,40%	> 30%	21,60%
3	Penggunaan QRIS (Transparansi Keuangan)	11,29%	100% (P6)	88,71 %
4	Kemandirian Input Laporan Keuangan Web	Rendah	Tinggi	Ketergantungan Pendamping

Sumber: Data BPS dan Dinas PPKUKM (diolah dari sumber,)

Tabel 5: Sintesis Matriks Keberlanjutan Finansial Pasca-Intervensi

Tabel kualitatif ini merangkum faktor penentu UMKM bisa bertahan atau tidak setelah dukungan pemerintah berkurang.

Dimensi Keberlanjutan	Kondisi Saat Ini (Ketergantungan)	Target Strategi Exit (Kemandirian)	Peran AI / Teknologi Masa Depan
Pasar	Bergantung pada Bazar Gratis Pemerintah.	Memiliki Ekosistem Digital Mandiri (Social Commerce).	AI untuk Segmentasi Pasar Otomatis.
Manajemen	Pencatatan Keuangan Manual/Tidak Ada.	Pelaporan Keuangan Digital Mandiri (QRIS/Web).	AI untuk Otomasi Laporan Laba-Rugi.
Produksi	Inovasi Berdasarkan Pelatihan Singkat.	Inovasi Berkelanjutan (Model Schumpeter).	AI untuk Desain Produk & Prediksi Tren.
Modal	Menunggu Bantuan Pemerintah (P7).	Akses Perbankan Mandiri (<i>Bankable</i>).	Big Data Keuangan untuk Skor Kredit.

V. CONCLUSION AND SUGGESTION

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi komprehensif terhadap implementasi Program Jakpreneur di berbagai wilayah administratif DKI Jakarta, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin fundamental terkait strategi *exit* dan keberlanjutan finansial UMKM:

1. **Paradoks Efektivitas Intervensi** : Program Jakpreneur melalui kerangka kerja 7P terbukti sangat efektif dalam meningkatkan **kapasitas internal** (output), yang ditunjukkan dengan lonjakan inovasi produk hingga 300% dan peningkatan produktivitas kerja sebesar 43%. Namun, terdapat paradoks pada level **ketahanan pendapatan** (outcome); di mana UMKM binaan memiliki



pendapatan yang cenderung lebih rendah dibandingkan kelompok non-binaan karena keterbatasan dalam mengimplementasikan digitalisasi bisnis dan akuntansi mandiri secara konsisten.

2. **Kegagalan Strategi Exit akibat "Funneling Problem":** Strategi transisi binaan menuju alumni mandiri terhambat oleh penurunan partisipasi yang drastis pada tahapan krusial, yaitu Pelaporan Keuangan (P6) dan Permodalan (P7). Kebijakan **pemerataan fasilitas** (kuantitas) seringkali mengorbankan **kedalaman intervensi** (kualitas), sehingga UMKM tidak mendapatkan pendampingan yang tuntas untuk mencapai otonomi finansial.
3. **Hambatan Otonomi Digital :** Kemandirian finansial pasca-pendampingan sangat bergantung pada digitalisasi, namun realitas di lapangan menunjukkan adopsi teknologi yang masih sangat rendah (hanya 8,40% di *marketplace*). UMKM masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada pendamping untuk tugas-tugas administratif digital, yang menjadi hambatan utama dalam merumuskan *exit strategy* yang berkelanjutan.
4. **Inovasi Schumpeterian sebagai Modal Resiliensi :** Meskipun aspek finansial masih fluktuatif, Jakpreneur berhasil melakukan transformasi pola pikir (*mindset*). Lahirnya inovator mikro yang mampu melakukan "kombinasi baru" (misalnya mengubah persepsi jamu tradisional melalui kemasan modern) merupakan modal sosial dan intelektual utama yang akan menjaga unit usaha tetap beroperasi meskipun dukungan langsung pemerintah mulai berkurang.

5.2 Saran

Untuk menjamin keberlanjutan finansial UMKM pasca-intervensi dan memperkuat strategi *exit* program, maka direkomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. **Re-desain Program: Menuju Framework 8 PAS:** Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disarankan menambahkan tahap kedelapan (**P8 - Monitoring Mandiri & Akses Global**). Tahap ini berfokus pada pelepasan binaan menjadi alumni yang dipantau melalui platform analitik digital, di mana intervensi fisik dikurangi secara bertahap dan digantikan dengan sistem *feedback* otomatis berbasis data performa usaha.



2. **Integrasi Kecerdasan Buatan (AI) untuk Efisiensi Mandiri:** Mengingat keterbatasan rasio pendamping (5 orang untuk ribuan peserta), Jakpreneur perlu mengintegrasikan alat berbasis AI untuk membantu alumni melakukan analisis pasar, desain produk inovatif, dan segmentasi konsumen secara mandiri tanpa harus bergantung pada instruksi manual dari pendamping pemerintah.
3. **Perubahan Kebijakan dari Pemerataan ke Pendalaman:** Meninjau kembali kebijakan pemerataan fasilitas dengan menerapkan **Pemetaan Peserta Berbasis Karakteristik**. UMKM yang memiliki potensi kemandirian tinggi harus diberikan intervensi yang lebih mendalam dan berkelanjutan hingga benar-benar "naik kelas" secara finansial, alih-alih memberikan jatah fasilitas yang sama rata namun tidak tuntas kepada semua peserta.
4. **Re-branding dan Kolaborasi Lintas Generasi:** Untuk mengatasi rendahnya minat generasi muda, Jakpreneur perlu melakukan *re-branding* strategis dengan masuk ke sekolah-sekolah kejuruan (SMK) melalui *workshop* teknologi dan kompetisi inovasi. Kolaborasi antara pengalaman pelaku usaha senior (ibu rumah tangga) dengan literasi teknologi generasi muda (Gen Z) dapat menjadi solusi untuk mempercepat transformasi digital di tingkat akar rumput.
5. **Penguatan Literasi Keuangan Digital Berbasis Aplikasi:** Mengembangkan aplikasi pelaporan keuangan yang lebih intuitif dan ramah pengguna (terutama bagi lansia) serta mewajibkan penggunaan QRIS secara konsisten sebagai prasyarat untuk mendapatkan akses pemasaran tingkat kota maupun internasional, guna membangun rekam jejak keuangan yang kredibel bagi perbankan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan Program Jakpreneur tidak hanya melahirkan jumlah wirausaha yang besar secara administratif, tetapi menciptakan ekosistem UMKM yang resilien, otonom, dan mampu bertahan secara finansial dalam jangka panjang tanpa ketergantungan penuh pada stimulus pemerintah.

VI. BIBLIOGRAPHY

Qurtubi, M., & Muhtadi, M. (2024). Efektivitas Program Permodalan Jakpreneur dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. *Jurnal Kommunity Online*.

Rohimah, S., Lukman, U., & Sundawa, R. D. (2022). Effektivitas Peran Jakpreneur dalam Pengembangan UMKM di Jakarta Barat (Studi Kasus pada UMKM di Kecamatan Tamansari). *Jurnal Universitas Ibnu Chaldun*.

Fadhila, F. K., & Hanri, M. (2024). Efek Program Pendampingan UMKM terhadap Performa Ketahanan Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM: Studi Kasus Program Jakpreneur DKI Jakarta. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*.

Zahra, A. M., & Sagita, N. I. (2023). Efektivitas Program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Penjaringan Wilayah Jakarta Utara. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Ocktaviani, P., Jahja, R. S., & Suryana, A. (2025). Evaluasi Program Jakarta Entrepreneur (JakPreneur) dalam Meningkatkan Kualitas Hidup: Studi 5 Binaan UMKM di Kecamatan Cipayung. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*.

Yulianto, A. B. (2025). Peran Kecerdasan Buatan dalam Mendorong Digitalisasi UMKM di DKI Jakarta. *JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)*.

Naura, H. P., & Subowo, A. (2025). Evaluasi Program Jakpreneur (Jakarta Entrepreneur) di Jakarta Selatan. *E-Journal Undip*.

Dinas PPKUKM DKI Jakarta. (2025). Laporan Mingguan Perkembangan Jakpreneur dan Implementasi QRIS.

